

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki periode ke empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini merupakan periode pembangunan jangka menengah pertama di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai fungsi penunjang pemerintah daerah bidang penelitian dan pengembangan, saat ini telah memasuki triwulan III pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan setelah di evaluasi dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan pasal 343 (1) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja), meliputi perubahan :

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Selain point-point tersebut di atas terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yakni :

1. Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
2. Optimalisasi APBD Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2022, sehingga perlu dialokasikan pada APBD-P Tahun 2022.
3. Alokasi anggaran program penelitian dan pengembangan daerah

Hal mendasar inilah yang menjadi latar belakang Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur juga mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun berjalan atau tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya Perubahan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui penetapan APBD-P Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 060/2700/Litbang, tanggal 1 September 2016 perihal Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang Di Lingkungan Pemda Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balitbangda Prov. Kaltim.
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun RKA Perubahan Tahun 2022 yang mengacu pada Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 tersebut adalah menghasilkan perencanaan penelitian yang matang untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kalimantan timur serta mendukung ibu kota negara yang ramah lingkungan dan terintegrasi, serta agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah dicanangkan dalam perjanjian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (2019-2023)

Capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan atau sampai dengan triwulan II tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan Atau Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN**

per 30 Juni 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		%
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.300.367.990,00	3.877.164.426,00	1.603.219.571,00	2.540.000,00	5.482.923.997,00	35,84	9.817.443.993,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	423.275.000,00	0,00	25.700.000,00	0,00	25.700.000,00	6,07	397.575.000,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.01.1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	266.875.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	5,32	252.675.000,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156.400.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	7,35	144.900.000,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.246.164.396,00	3.792.024.426,00	0,00	0,00	3.792.024.426,00	37,01	6.454.139.970,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.246.164.396,00	3.792.024.426,00	0,00	0,00	3.792.024.426,00	37,01	6.454.139.970,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.604.774.360,00	0,00	587.463.275,00	0,00	587.463.275,00	36,61	1.017.311.085,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	112.671.000,00	0,00	32.738.000,00	0,00	32.738.000,00	29,06	79.933.000,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	174.890.400,00	0,00	42.673.000,00	0,00	42.673.000,00	24,43	132.217.400,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.317.422.960,00	0,00	512.052.275,00	0,00	512.052.275,00	38,87	805.370.685,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.082.488.484,00	85.140.000,00	924.631.366,00	0,00	1.009.771.366,00	48,49	1.072.697.118,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.06.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	0,00	3.748.000,00	0,00	3.748.000,00	18,74	16.252.000,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.06.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.207.604,00	0,00	95.311.466,00	0,00	95.311.466,00	38,40	152.896.138,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.06.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.814.280.880,00	85.140.000,00	825.571.900,00	0,00	910.711.900,00	50,20	903.568.980,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	943.685.750,00	0,00	65.424.930,00	2.540.000,00	67.964.930,00	7,20	875.720.820,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.772.350,00	0,00	49.634.930,00	2.540.000,00	52.174.930,00	28,24	132.597.420,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.350.000,00	0,00	9.190.000,00	0,00	9.190.000,00	3,40	261.160.000,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.563.400,00	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	1,68	390.763.400,00
0.00 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 1.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000.000,00
5.05 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 2.1.01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.586.688.000,00	0,00	606.668.770,00	0,00	606.668.770,00	23,45	1.980.019.230,00
5.05 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 2.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengajian Peraturan	594.780.000,00	0,00	86.493.900,00	0,00	86.493.900,00	14,54	508.286.100,00
5.05 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 2.1.01.1	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	162.600.000,00	0,00	14.840.000,00	0,00	14.840.000,00	9,13	147.760.000,00
5.05 - 5-05.0-00.0-00.01.0.0 - 2.1.01.2	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	27.680.000,00	0,00	2.816.000,00	0,00	2.816.000,00	10,18	24.864.000,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.01.3	Feasitbel, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketatalaksanaan	41.000.000,00	0,00	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00	5,92	38.568.000,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.01.4	Feasitbel, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	193.400.000,00	0,00	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	1,27	190.944.000,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.01.5	Feasitbel, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	170.010.000,00	0,00	63.949.900,00	0,00	63.949.900,00	37,62	106.060.100,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	424.872.000,00	0,00	44.452.400,00	0,00	44.452.400,00	10,46	380.419.600,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	285.472.000,00	0,00	43.452.400,00	0,00	43.452.400,00	15,22	242.019.600,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.02.3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	139.400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,72	138.400.000,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	775.875.000,00	0,00	276.616.900,00	0,00	276.616.900,00	35,85	499.258.100,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.03.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	292.250.000,00	0,00	123.099.900,00	0,00	123.099.900,00	42,12	169.150.100,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.03.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	283.250.000,00	0,00	40.994.800,00	0,00	40.994.800,00	14,47	242.255.200,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.03.3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	200.375.000,00	0,00	112.522.200,00	0,00	112.522.200,00	56,18	87.852.800,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	791.181.000,00	0,00	199.105.570,00	0,00	199.105.570,00	25,17	592.075.430,00
5.05.5-05.0-00.0-00.01.0.0.2.1.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	791.181.000,00	0,00	199.105.570,00	0,00	199.105.570,00	25,17	592.075.430,00
	Jumlah	17.887.055.990	3.877.164.426	2.209.888.341	2.540.000	6.089.592.767		11.797.463.223



Dari anggaran Rp. 17.887.055.990,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.089.592.767,- atau 34%. Walaupun masih dalam kondisi pandemic Covid 19, realisasi pelaksanaan kegiatan rutin ataupun kelitbangan telah dilaksanakan dan tidak ada kendala, karena dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi terhadap indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2019-2023, sebagaimana tabel 2.1.3 berikut :

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Tahun 2019-2023 Balitbangda Prov. Kaltim
(Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah										
4	07	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlayannya administrasi perkantoran	Persen	100	100	80	80	100	Permendagri 90/2019	100	100
			01	Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Kegiatan	75	15	15	15	100	Permendagri 90/2019	30	40
07	01	08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memilki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit Kerja	5	2	3	3	100	Permendagri 90/2019	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)				
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah													
	02	Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Kegiatan	40	8	8	8	100	Permendagri 90/2019	16	40		
07	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	Persen	85	80	81	81	100	Permendagri 90/2019	80	94	
			01	Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Orang	747	212	340	437	97	Permendagri 90/2019	649	87
			02	Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Orang	60	1	10	1	10	Permendagri 90/2019	2	3

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Usuran Penunjang Pemerintahan Daerah													
07	01	10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja PD	BB/A	81	59	78	56	82	Permendagri 90/2019	59	73
			01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	50	10	10	10	100	Permendagri 90/2019	20	40
				Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan	115	23	23	23	100	Permendagri 90/2019	46	40
07	01	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	Persen	80	80	80	80	100	Permendagri 90/2019	80	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)	
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah										
	02 Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan	Persen	80	80	80	80	80	Permendagri 90/2019	80	100
		Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana	laporan	350	70	70	10	100	Permendagri 90/2019	80	23
		Kegiatan Rakorda Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	Permendagri 90/2019	100	100
07	01 48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	Permendagri 90/2019	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah										
	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sosial dan Budaya Yang Dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40
		Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan , Pemberdayaan Yang Dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40
		Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah & Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40
	Kegiatan penelltian mandiri bidang social dan pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri bidang social dan pemerintahan	Laporan	35	7	7	0	100	Permendagri 90/2019	14	40

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)	
									Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah										
07	01	41		Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan	Persen	100	100	70	70	100	Permendagri 90/2019	85	85
			01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40
					Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)			
						Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah												
		Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40		
		Kegiatan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan	Laporan	30	5	5	0	100	Permendagri 90/2019	5	17		
07	01	47	Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	Persen	100	100	70	70	100	Permendagri 90/2019	85	85

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2019-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2019-2020)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah										
	01 Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40
		Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40
		Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	Laporan	5	1	1	1	100	Permendagri 90/2019	2	40
		Kegiatan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	Laporan	17	4	1	1	100	Permendagri 90/2019	5	29.4

Catatan :

1. Program dan kegiatan pada matrik tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah dilaksanakan mulai tahun 2019-2020,
2. Tingkat realisasi capaian kinerja Renstra beberapa kegiatan berada di bawah 87%, disebabkan oleh perubahan nomenclature, sehingga target Renstra hanya dihitung dari tahun 2019-2020.

(sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2019)

bangda Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021- 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021- 2023)				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+ 7+9)	11=(10/ 4)			
4	07	01	07	Urusan Penunjang pemerintahan daerah			100%	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	100%	90%	90%
			01	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			100%	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	95%	95%	95%
07	01	08		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase	100	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengkajian Peraturan								
	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	33%
07	01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Pemerintahan Umum									
	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2 laporan	1 laporan	33%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1			2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07	01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	6	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2 laporan	2 laporan	33%
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	0	1	100%
		01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	100%	100%
07	01	23	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	33%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	100%	100%
02	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan	2	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 Laporan	1 Laporan	50%
	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan	Laporan	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 Laporan	1 Laporan	50%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
				Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan									
				Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Laporan	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 Laporan	1 Laporan	50%
07	01	48		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Laporan	2	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	50%
				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Laporan	2	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	50%
07	01	41		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penelitian dan	Laporan	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Pengembangan Pekerjaan Umum											
	01	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Laporan	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	100%	
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Laporan	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 laporan	1 laporan	100%	
07	01	47	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	100%	100%
	01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan	9	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2 laporan	2 laporan	22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rancang bangun	2	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 RB	1 RB	50%
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Inovasi	24	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12 inovasi	12 inovasi	50%
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	2 laporan	2 laporan	66%
		Jumlah hasil kelitbangan yang di Diseminasikan	Diseminasi	75	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	25 diseminasi	10 diseminasi	13%
		Jumlah artikel jurnal yang diterbitkan	artikel	30	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10 artikel	10 artikel	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang difasilitasi	HKI	45	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah	Persentase	100	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	100%	95%	95%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi konerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	Dokumen	93	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	31 dokumen	31 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Laporan	63	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	21 dokumen	21 dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	30	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10 Dokumen	10 Dokumen	33%
	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	42	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	14 Dokumen	14 Dokumen	33%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen	42	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	14 dokumen	14 dokumen	33%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	30	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10 dokumen	10 dokumen	33%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai	37	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	10 pegawai	10 pegawai	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Bulan	36	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12 bulan	12 bulan	33%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	Buah	71.500	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	23.500 buah	2300	3%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Jenis	44	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	12 jenis	12 jenis	33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	29	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	8 unit	8 unit	27%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Jenis	81	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	27 Jenis	27 jenis	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021-2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Pegawai	1.303	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	358	429 pegawai	33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit	168	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	56 unit	56 unit	33%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	11	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	3 unit	3 unit	27%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Unit	58	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	16 unit	16 unit	27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021- 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021- 2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+ 7+9)	11=(10/ 4)
	Pengadaan Mebel	jumlah mebelair yang diadakan	Unit	169	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	37 unit	37 unit	22%
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Bulan	36	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	12 bulan	12 bulan	33%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	Surat	364	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	100 surat	95 surat	26%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji non ASN	Laporan	39	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	13 laporan	13 laporan	33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	laporan	36	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	12 laporan	12 laporan	33%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan	Kegiatan	15	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	5 kegiatan	5 kegiatan	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021- 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021- 2023)		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+ 7+9)	11=(10/ 4)	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prasrana milik daerah									
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Unit	1	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	82	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	25 unit	25 unit	30%
	pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	Permenda gri 13 th 2006	2 unit	2 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021- 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (n- 3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Progr am dan Kegiat an (Renja) Tahu n 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021- 2023)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaian n Progra m dan Kegiat an s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian n Realisas i Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+ 7+9)	11=(10/ 4)
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	189	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	52 unit	52 unit	27%
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	1	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	Permendagri 13 th 2006	1 unit	1 unit	100%

Catatan :

1. Program, kegiatan, sub kegiatan periode Renstra Tahun 2021-2023 pada tabel di atas telah disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019.
2. Capaian kinerja pada kolom 9 dan 10 adalah perkiraan sampai dengan triwulan ke IV.
3. Pada triwulan ke III tahun 2021 sempat terjadi refocusing anggaran sebagai dampak pandemic covid-19, namun pada bulan Nopember 2021 anggaran dikembalikan kembali ke Perangkat Daerah,
4. Meskipun demikian sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan realisasi capaian kinerja keuangan ataupun fisik diperkirakan mencapai angka

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan Renja Balitbangda Prov. Kaltim Triwulan IV (Oktober-Desember) merupakan anggaran DPA Perubahan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2020, terdiri dari 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan. Adapun penjelasan atau uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada triwulan IV realisasi keuangannya Rp. 440.351.387,-, sampai dengan triwulan IV terealisasi Rp. 1.268.803.028,-. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 14 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Honorarium pengelola keuangan.
- b) Belanja ATK
- c) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.
- d) Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran.
- e) Belanja telepon.
- f) Belanja air
- g) Belanja listrik
- h) Belanja surat kabar/majalah.
- i) Belanja kawat/faxsimili/internet/TV kabel/TV satelit.
- j) Belanja paket/pengiriman.
- k) Belanja jasa publikasi
- l) Belanja jasa tenaga teknis/non teknis.
- m) Belanja cetak
- n) Belanja penggandaan

Capaian kinerja kegiatan berupa jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebanyak 14 (empat belas) kegiatan atau 100%. Capaian indikator kinerja program dengan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM), pada triwulan IV terealisasi sebesar 25%.

Realisasi capaian kinerja keseluruhan dari triwulan I - IV tercapai 85%, sehingga pengukuran tingkat capaian kinerja program tercapai 100%. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SPM) pada tahun 2020 belum dapat dilaksanakan, sehingga perhitungan tersebut diperoleh dari tingkat kepuasan sub satker pada Balitbangda Prov. Kaltim terhadap pelayanan sekretariat terkait kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp.561.204.875, sedangkan sampai dengan

triwulan IV Rp. 799.236.203,- dengan realisasi capaian kinerja kegiatan tercapai 100% atau 13 kegiatan. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Honorarium tim pengadaan barang dan jasa.
- b) Belanja alat listrik dan elektronik.
- c) Belanja jasa pemeliharaan alat kantor dan gedung.
- d) Belanja pemeliharaan kantor dan taman.
- e) Belanja penggantian suku cadang.
- f) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.
- g) Belanja pajak kendaraan bermotor
- h) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- i) Belanja pengadaan mesin penghancur kertas.
- j) Belanja pengadaan printer.
- k) Belanja pengadaan computer (hardisk eksternal).
- l) Belanja pengadaan kamera.
- m) Belanja pengadaan proyektor.

Realisasi kinerja program (unit kerja PD atau sub satker yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu) dengan target sub satker yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu, terpenuhi oleh 3 unit sub satker yakni : bidang sosial dan pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang inovasi dan teknologi). Penilaian berdasarkan ketepatan dalam penyampaian SPJ kegiatan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.096.301.692,-. Realisasi capaian kinerja program dengan uraian persentase ASN yang memiliki standar kompetensi tidak dapat tercapai karena pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa bimte/diklat/pelatihan tidak dapat dilaksanakan karena pandemic covid-19.

Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Kegiatan dengan indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi pada triwulan IV terealisasi sebanyak 323 orang, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 951.981.692,-. Sampai dengan triwulan IV terealisasi sebanyak 437 orang sebesar Rp. 1.273.594.943,-.

Bahwa koordinasi dan konsultasi yang telah dilaksanakan terkait dengan kelitbangan, pengambilan data penelitian dan menghadiri undangan yang bersifat penting.

- b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran covid-19, sehingga tahun 2020 tidak ada kursus-kursus singkat/pelatihan, untuk ASN/fungsional peneliti yang akan mengikuti diklat atau bimtek.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan uraian indikator kinerja program yakni nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, akan dinilai pada triwulan I tahun 2021 oleh Inspektorat Prov. Kaltim dengan target nilai 79.00 (BB), sehingga pada triwulan IV Tahun 2020 belum dapat diperoleh nilai SAKIP tersebut.

Program terdiri dari 2 kegiatan yakni :

- a) Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran. Target capaian kinerja kegiatan adalah 10 dokumen perencanaan dan anggaran, yang terdiri dari :

- 1) DPA Tahun 2020
- 2) RKA Tahun 2020,
- 3) DPA-P Tahun 2020
- 4) RKA-P Tahun 2020,
- 5) Renja Tahun 2021
- 6) Rancangan Renja Tahun 2021
- 7) Rancangan Akhir Renja Tahun 2021
- 8) Renja Tahun 2021
- 9) Perubahan Renja Tahun 2020
- 10) Draft Revisi Renstra Tahun 2019-2023.

Pada triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.928.400,-, dengan capaian kinerja fisik sebanyak lima dokumen perencanaan dan anggaran. Sampai dengan triwulan IV telah tersusun 10 dokumen perencanaan dan anggaran atau tercapai 100%.

- b) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah pada triwulan IV realisasi keuangan sebesar Rp. 2.800.000,-. Sampai dengan triwulan IV realisasi keuangan tercapai Rp. 4.300.000,- sebanyak 23 dokumen. Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut terdiri dari 23 (dua puluh tiga) laporan yakni :

1. LKjIP Tahun 2019 (PK, IKU dan Kertas Kerja Ess II, III dan IV, RKT Tahun 2020)
2. LPPD Tahun 2019.
3. Teppra (Januari-Desember) Tahun 2020/ 12 dokumen.
4. Laporan Evaluasi dan Pengendalian Renja Tahun 2020 (triwulan I s.d IV)/4 dokumen.
5. Radalok (triwulan)

6. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2020.

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki indikator kinerja program yaitu persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal dengan target 80%. Sampai dengan triwulan IV realisasi keuangan Rp. 206.157.500,-, dengan tingkatan capaian kinerja 100%. Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangan.

Kegiatan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan, berupa kegiatan website dengan target 80%. Perhitungan target 80% diperoleh dari terselenggaranya kegiatan webhosting dan pengelolaan website. Sampai dengan triwulan IV tingkat capaian kerjanya 100%.

2. Jumlah Artikel Jurnal Riset Pembangunan. Pada Tahun 2020 ini jurnal tersebut berlaku on line dan terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Juni dan Desember). Setiap jurnal berisikan 5 (lima) artikel atau karya tulis ilmiah yang telah lulus verifikasi oleh tim penilai atau asesor Jurnal Riset Pembangunan Balitbangda Prov. Sampai dengan triwulan IV terbit 10 (sepuluh) artikel.

b) Kegiatan Rakorda Kelitbangan dengan indikator kinerja persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan terealisasi 100% pada triwulan IV yang dilaksanakan padabulan Nopember. Realisasi kegiatan berupa pelaksanaan Rakorda Kelitbangan dan laporan akhir.

6. Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan

Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan sampai dengan triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 311.377.200,-. Sampai dengan triwulan IV, capaian indikator kinerja program persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan tercapai 100%.

Program terbagi dalam dua kegiatan yakni :

a) Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang :

- Sub Bidang Sosial Budaya dengan judul “Pemberian Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kab/Kota Se-Provinsi Kaltim”. Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Diperolehnya kriteria penilaian dari parapihak.

2. Terverifikasi dan tervalidasinya kriteria penilaian.

3. Diperolehnya hasil penilaian panji-panji keberhasiltan tahun 2020.

4. Terverifikasi dan tervalidasinya hasil penilaian.
 5. Terbitnya SK Gubernur tentang penetapan pemenang.
 6. Penyerahan pemenang dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2021.
- Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan judul “Penilaian Perangkat Daerah Terbaik di Lingkungan Pemprov. Kaltim Tahun 2019”. Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
1. Diperolehnya daftar pemenang penghargaan Perangkat Daerah Terbaik.
 2. Penyerahan Penghargaan dilaksanakan di kantor Balitbangda Prov. Kaltim, secara luring terbatas dan daring, bersamaan dengan Rakorda Kelitbangan dan penandatanganan MoU Kelitbangan tiga Perguruan Tinggi di Samarinda.
 3. Laporan akhir kegiatan.
- Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan dengan judul kegiatan “Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal pada perusahaan sektor swasta, BUMN, dan BUMD di Kalimantan Timur”. Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
1. Seminar penelitian secara luring terbatas dan daring.
 2. Laporan akhir kegiatan.
 3. Rekomendasi terhadap **Kebijakan Pemerintah Daerah**
- Sebagai bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum khususnya hak untuk bekerja bagi tenaga kerja lokal Kalimantan Timur perlu segera membuat regulasi serta peraturan-peraturan mengenai sistem pemberian kesempatan yang lebih luas kepada tenaga kerja lokal Kalimantan Timur untuk mengakses pemberi kerja di Kalimantan Timur agar mereka memperoleh kesempatan sebaikbaiknya untuk memperoleh pekerjaan di Kalimantan Timur sebagai warga di Provinsi ini.
- b) Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
1. Seminar penelitian secara luring terbatas dan daring.
 2. Laporan akhir kegiatan.
 - Kegiatan Kajian Hubungan Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
- Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah :

- Pemerintah Kecamatan, hendaknya memberikan “ruang gerak” yang bebas kepada unsur perangkat kerja Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pelimpahan kewenangan, maka Lurah nantinya akan dapat bergerak yang lebih luas untuk melakukan tugas dan fungsinya, termasuk inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, bukan sebaliknya menjadi penghambat bagi Kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - Perlu ketegasan peran Pemerintah Kecamatan dalam hubungan dengan Pemerintah Desa dikarenakan ada posisi kemandirian desa dalam Undang Undang Desa. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai tahanan evaluasi.
- Kajian Kinerja Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kaltim.
Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Diperlukan intervensi pemerintah untuk membantu pemasaran dalam menampung hasil kreasi dari kelompok usaha perempuan, dapat melalui platform digital (aplikasi jual beli) maupun pasar kreatif yang rutin diadakan
- Kegiatan Kajian Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Daerah di Kaltim.
Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Perlunya penguatan pengawasan pelaksanaan kebijakan dalam proses pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung lingkungan
- Kegiatan Kajian Pemetaan Sumber Daya Aparatur Desa di Kaltim/Lanjutan.
Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : perlunya peningkatan jumlah dan kualitas aparatur desa di wilayah perdesaan Kalimantan Timur. Peningkatan kualitas tidak hanya aspek teknis administrasi, namun manajerial dan kewirausahaan, meliputi: bidang perencanaan penganggaran, keuangan desa, kebijakan desa, dan manajemen pelayanan desa. Peningkatan kapasitas ini tentu melalui bimbingan teknis, pendampingan, serta terprogramnya kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang

berkesinambungan tentang lima aspek yang perlu ditingkatkan kapasitasnya tersebut.

- Kegiatan Kajian Dana Desa, Urbanisasi, dan Kemandirian Desa/Lanjutan.

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Urbanisasi di Kalimantan Timur dalam satu sisi menunjukkan keberhasilan pembangunan. Urbanisasi yang tidak terkendali pada sisi lain memberikan dampak negatif pembangunan. Kalimantan Timur dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah Perdesaan dan perkotaan melalui urbanisasi yang terkendali melalui pembangunan wilayah perkotaan dan Perdesaan secara terpadu. Pembangunan wilayah perkotaan dan Perdesaan dapat dimulai dari wilayah utama yang menjadi prioritas terlebih dahulu.

- Kegiatan Studi Perkembangan dan Penanganan Teroris di Kaltim.
Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Hendaknya pemerintah memberikan perhatian yang intens terhadap permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat, seperti masalah ekonomi, pendidikan, kesenjangan sosial, sehingga benih-benih radikalismeterorisme yang mengatasnamakan agama dapat diminimalisasi pertumbuhannya

7. Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan sampai dengan triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 446.535.500,-. Sampai dengan triwulan IV, capaian indikator kinerja program persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan tercapai 100%.

Alokasi dana tersebut terbagi dalam 2 (dua) kegiatan sub bidang yakni :

- a) Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yakni :

- Sub Bidang Ekonomi dengan judul kegiatan :

- 1) Kajian Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Paser, sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan laporan akhir. Rekomendasi terhadap **Kebijakan Pemerintah Daerah** adanya peran pemerintah daerah dalam hal pendanaan terutama yang terkait dengan peningkatan potensi desa.

- 2) Kajian Antisipasi Pelemahan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Dampak Dari Resesi Ekonomi Global Dalam Kondisi Pandemi Covid-19. Rekomendasi terhadap **Kebijakan Pemerintah Daerah**
- Dalam upaya Perbaikan Ekonomi khususnya Iklim Investasi, Industri Manufaktur dan Pariwisata, pemerintah dapat membentuk tim *Task Force* Percepatan Pemulihan Ekonomi di Kalimantan Timur, yang bertugas mempersiapkan Rencana Investasi yang siap di jual ke Investor. Mulai dari Hulu – tengah hingga – Hilir. Tugas tim *Task Force* akan disusun berdasarkan Keputusan Gubernur.
 - Mengantisipasi perubahan rantai pasokan barang ke daerah Kaltim, pemerintah melalui SKPD untuk memastikan protokol logistik yang menjamin kemudahan aliran barang antar daerah. Kemudian, dalam jangka menengah hingga panjang, diperlukan kebijakan yang lebih strategis dan mendasar, khususnya menjaga pasokan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan makanan utama berupa Beras.
 - Untuk mengatasi Pengangguran, Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya,
 - Pemerintah Provinsi dapat menyediakan program untuk pekerja sektor formal.
 - Pemerintah Provinsi Kaltim dapat membuat program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga.
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Usaha Peningkatan Produksi Pangan Pada Lahan Potensial dan Pemanfaatan Lahan Kritis Di Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan laporan akhir. Rekomendasi terhadap **Kebijakan Pemerintah Daerah** : Pemerintah Daerah harus konsisten dalam penggunaan lahan di daerah karena telah didukung dengan adanya pengendalian konversi lahan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41/2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan :

1. Laporan akhir

2. Dengan judul kegiatan :

4. Kajian Strategi Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Sentra Produksi Perikanan Kota Bontang.

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Penambahan kuota BBM bersubsidi untuk mendukung kepastian usaha perikanan tangkap nelayan. Perjanjian Kerja Sama Andon antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah untuk mengakomodir nelayan Andon mendapatkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Andon) Andon dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Kajian Analisis Potensi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dimasa Transisi Ibu Kota Negara (IKN 2020 – 2024).

Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah :

- Membentuk *Task-Force* pembentukan BUMD Kaltim Niaga Enterprises (PT.KALNES) dengan membuat Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Task-Force* pembentukan BUMD.
- Segera Menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Bisnis PT KALNES,
- Mempersiapkan Kelembagaan BUMD Kaltim Niaga Enterprises,
- Menugaskan *Task-Force* untuk menyusun *Profile Company* BUMD Kaltim Niaga Enterprises, sebagai bahan Pejualan Saham kepada Investor dan Rekan Kerja.

6. Kegiatan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan. Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

1. Laporan akhir kegiatan.

2. Adapun judul kegiatan :

1) Identifikasi Kemacetan Arus Lalu Lintas Di Kota Samarinda.

Rekomendasi terhadap pemerintah : membuat Ruang Henti Khusus kendaraan (RHK) sepeda motor di simpang bersinyal yang masing-masing kaki simpang di ruas jalan yang sering mengalami kemacetan

2) Analisa Nilai Tambah Produk Pertanian Di Kalimantan Timur.

Rekomendasi : Dukungan produk dari hulu sampai ke hilir sangat diperlukan perencanaan yang baik agar bahan baku tersedia secara konsisten. Nilai tambah produk pertanian tersebut dapat meningkatkan pendapatan baik petani maupun pelaku usaha yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

3) Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

- Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas, Pada Tahun Anggaran 2015-2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Aparatur dibandingkan dengan kegiatan Belanja Publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Publik yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang meliputi tiga bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Berdasarkan perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pada Tahun Anggaran 2015-2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, karena belanja langsung sangat memengaruhi kualitas output kegiatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seharusnya dapat meningkatkan Belanja Langsung agar kualitas outputnya meningkat, dan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.

4) Analisis Peramalan Jumlah Permintaan Darah di Samarinda.

Rekomendasi : Dalam rangka pemenuhan kebutuhan darah di Kota Samarinda dan pemenuhan standarisasi tentang cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dukungan dari Pemerintah daerah berupa anggaran, sarana dan prasarana seperti peralatan, pembinaan, bimbingan serta dukungan dari masyarakat Kota Samarinda beserta *stakeholder* terkait sangat diperlukan.

8. Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi

Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi sampai dengan triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 417.223.900,-. Sampai dengan triwulan IV, capaian indikator kinerja program persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi tercapai 100%.

Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni :

a) Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yakni :

1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, dengan judul kegiatan. : Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Pengumpulan Data Inovasi dan Pengembangan Teknologi/Gelar Inovasi Teknologi)". Sampai dengan triwulan IV kegiatan telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

➤ Laporan Akhir.

➤ Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Perlu adanya penghargaan kepada instansi, Perangkat Daerah, masyarakat maupun dunia usaha yang telah melakukan inovasi dan pengembangan teknologi agar semakin memotivasi mereka dalam melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, disamping itu juga perlu adanya dorongan dan dukungan dalam bentuk anggaran untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dari inovator serta perlu adanya pendampingan teknis untuk meningkatkan pengembangan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

- *Focus Group Discussion (Fgd) Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Pra Feasibility Study (Pra-Fs) The Buluminung Nuclear Industry Science Techno Park (BNI-STP)*. Sampai dengan triwulan IV telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

➤ Laporan Akhir.

➤ Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : segera lakukan komunikasi dan koordinasi intensif antara pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini adalah Balitbangda Provinsi Kaltim dengan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam hal ini Bappelitbang Kabupaten PPU. Hal yang serupa juga segera dilakukan dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) oleh Balitbangda Prov. Kaltim dan Bappelitbang Kab. PPU.

2. Sub Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi dengan judul – judul kegiatan :

- Fasilitasi Kegiatan Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi/Konsolidasi, Koordinasi, Inovasi dan Teknologi Pada Lembaga/Kementerian Terkait. Sampai dengan triwulan IV telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

➤ Laporan akhir

➤ Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pemerintah provinsi melalui Balitbangda Prov.Kaltim kepada lembaga litbang di daerah yaitu kabupaten dan kota di kaltim, guna mengintensifkan pengembangan informasi data dan inovasi teknologi dalam memotivasi kreativitas inovatif untuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

- Penjaringan Peserta Inovasi Dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (Pepes Ikan Peda) Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur. Sampai dengan triwulan IV telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

➤ Laporan akhir.

➤ Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah : Setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota, harus konsisten dalam melakukan inovasi. Sehingga inovasi tidak berhenti, tapi bisa terus berjalan baik itu berupa pengembangan maupun inovasi baru.

3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan dengan judul kegiatan diseminasi hasil kelitbangan, pada triwulan IV telah tercapai 100%, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

- Laporan Akhir.
- Rekomendasi di bidang pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pertanian dan perkebunan, lingkungan hidup.

b) Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi, sampai dengan triwulan IV realisasi keuangannya sebesar Rp. 41,312.400,- dengan judul kegiatan “ Strategi Pengembangan Inovasi Pengembangan Industri Perikanan di Kota Bontang”. Realisasi kegiatan :

▪ Laporan Akhir.

▪ Rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas kelitbangan tersebut, telah didukung dengan kesepakatan dan kerjasama berupa MoU dan PKS yang dilaksanakan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 seperti tampak pada tabel 2.1.3 berikut :

Tabel 2.1.4
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesepakatan dan Kerjasama
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
1.	MoU :					
	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia	1 (Satu) Tahun, 28 April 2016 sd 28 April 2017	Kerjasama lingkup Litbang teknologi pertanian spesifik lokal berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Balai Teknologi Pertanian Kaltim
	PKS :					
	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	7 (Tujuh) Bulan, 2 Mei 2016 sd 2 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun data dan informasi kesesuaian beberapa jenis komoditas pertanian sesuai dengan kondisi agroekosistem wilayah. - Menyusun peta perwilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agriekologi skala 1 : 50.000 di Kab. PPU, Samarinda , Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur. - Mengidentifikasi komoditas unggulan di Provinsi Kalimantan Timur. 	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	Selesai : kerjasama ditindaklanjuti melalui kegiatan “Perwilayahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Pertanian Di Kalimantan Timur Tahun 2016”
2.	MoU :					

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	12 (dua belas) bulan, mulai 02 Nopember 2016-02 Nopember 2017	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	12 (dua belas) bulan, mulai 02 Nopember 2016-02 Nopember 2017,	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)	Tidak ada	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
	PKS :					
	Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	5 (lima) Tahun, 2 Nopember 2016 sd 2 November 2021	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama. dengan Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara	Bertukar data dan informasi kelitbangan dan mengaplikasikan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk : - Sosialisasi perubahan nomenclatur pada OPD

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	Balitbangda Kabupaten Kutai Timur	5 (lima) Tahun, 2 Nopember 2016 sd 2 November 2021	Kerjasama kelitbangan di : - Bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan - Bidang sosial ekonomi dan kependudukan - Bidang ekonomi dan pembangunan - Bidang inovasi dan teknologi	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.dengan Balitbangda Kabupaten Kutai Timur	Balitbangda di Provinsi Kalimantan Timur. - Sosialisasi hasil-hasil Ristek Aplikatif yang berbasis komoditas - Sosialisasi komoditas jelai sebagai salah satu potensi sumber pangan yang dapat dibudidayakan di Kalimantan Timur. - Sosialisasi komoditas kakao sebagai bahan baku pembuatan coklat dan permen guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani kakao. - Untuk PKS antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Balitbangda Kab.

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
						Kutai Timur dalam proses menuju kerjasama tripartit.
3.	MoU :					
	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Dan Provinsi Kalimantan Utara	5 (lima) tahun, mulai 15 Desember 2014-15 Desember 2019	Pengembangan potensi kawasan di sekitar yang dilalui ALKI-II di bidang : - Bidang Kelautan dan Perikanan, - Bidang Perhubungan, - Bidang Pariwisata, - Bidang SDM dan Iptek, - Bidang Perdagangan, - Bidang PU dan Infrastruktur - Bidang Lingkungan Hidup - Bidang lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan ALKI-II	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi antara pihak kerjasama	PKS antara Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Tengah
	PKS :					
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5 (lima) tahun , mulai 12 November 2016 sd 12 November 2021.	1. Kelitbangan dan inovasi pada 8 bidang : - Bidang Kelautan dan Perikanan, - Bidang Perhubungan, - Bidang Pariwisata, - Bidang SDM dan Iptek, - Bidang Perdagangan, - Bidang PU dan Infrastruktur	Terlaksana (rapat - rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Sedang berjalan

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Lingkungan Hidup - Bidang lainnya yang dapat dikembangkan di kawasan ALKI-II 2. Kerjasama workshop/seminar dan kegiatan lainnya 3. Mengadakan pertemuan secara berkala dan berkelanjutan 			
4.	Fakultas Pertanian Universitas Mataram	3 (tiga) tahun mulai 24 Juli 2014 – 24 juli 2017	Bidang penelitian dan pengembangan ketahanan pangan, tanaman penghasil gaharu dan teknologi produksi gubal gaharu	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Kegiatan terlaksana dalam bentuk kegiatan pengembangan gaharu di Kalimantan Timur, namun rasionalisasi anggaran PKS tidak dapat dilanjutkan.

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
5.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum	3 Tahun (2 Juni 2014 sd 2 Juni 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan bidang infrastruktur jalan dan jembatan melalui pelatihan sumber daya manusia dan bentuk <i>in-house training</i> atau <i>on job training</i>. - Penelitian Bersama (<i>Joint Research</i>) - Tukar menukar informasi hasil litbang dan standarisasi konstruksi - Advis Teknik teknologi jalan dan jembatan - Joint workshop/seminar/sarasehan dan kegiatan relevan lainnya di bidang jalan dan jembatan 	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)	Jangka waktu MoU dengan Kementerian PU sudah berakhir pada tahun 2014, maka berdampak terhadap pelaksanaan PKS selanjutnya.	Sedang dalam proses perpanjangan MoU sehingga PKS dapat dilanjutkan kembali
6.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKS)	3 (Tiga) Tahun (24 Maret 2015 sd 24 Maret 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan sumber daya air melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk <i>in house training</i> dan <i>on job the -training</i>. - Penelitian Bersama (<i>Joint Research</i>) bidang sumber daya air. - Advis teknis dalam bidang sumber daya air. 	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)		

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan praktek kerja penggunaan alat laboratorium bidang sumber daya air. - Joint workshop/seminar/sarasehan dan kegiatan lainnya di bidang sumber daya air - Sharing data terkait bidang sumber daya air 			
7.	Universitas Brawijaya Malang	1 (Satu) Tahun (21 Juni 2016 sd 21 Juni 2017)	Bidang pendidikan, penelitian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan sosial budaya dan kepariwisataan	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan rasionalisasi anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Terkait rasionalisasi anggaran, kegiatan hanya dilanjutkan dengan menginisiasi perintah direktif Gubernur Kaltim mengenai persiapan relokasi binatang-binatang peliharaan PT. Gunung Bayan Kab. Kutai Barat ke Kaltim Zoo dengan bekerjasama dengan pihak Jatim Park.
8.	Kesepakatan Bersama					
	- Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda	30 Nopember 2020-30 Nopember 2023	- Penelitian dan pengembangan di berbagai aspek pembangunan	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan refocusing anggaran berdampak pada terhambatnya	Pelibatan tim universitas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan penyusun

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda 		<ul style="list-style-type: none"> - Tukar menukar informasi ilmu pengetahuan dan teknologi - Pemagangan dan praktek kerja lapangan 		koordinasi dan konsolidasi kerjasama.	Studi Kelayakan The Mountain of ISRAN
9.	Kesepakatan Bersama					
	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur dengan Direktur Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 	14 Juli 2020-31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan pengembangan di berbagai aspek pembangunan daerah - Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi - Pemagangan dan praktek lapangan 	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan refocusing anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi kerjasama	FGD, DED dan pembangunan fisik The Mountain of ISRAN
10.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur	14 Juli 2020-31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan hortikultura - Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi 	Terlaksana (rapat -rapat, koordinasi, konsolidasi)	Kebijakan refocusing anggaran berdampak pada terhambatnya koordinasi dan konsolidasi	

No.	PIHAK KERJASAMA	MASA BERLAKU	LINGKUP KERJASAMA	MONEV	MASALAH	TINDAK LANJUT
			- Pemagangan dan praktek lapangan		kerjasama, serta pembangunan fisik The Mountain of ISRAN	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda Prov. Kaltim

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (%)					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022(%)	TAHUN 2023 (%)	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat			Indikator lama	26%	19%	27%	27%	Indikator lama	26%	19%	27%	
2	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan IKN				9%	18%	36%	36%		9%	18%	36%	

Catatan : Indikator Kinerja Utama tahun 2019 berbeda dengan tahun 2020-2023, karena pergantian kepemimpinan Kepala Badan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Issue Strategis Balitbangda Provinsi Kaltim :

1. Penetapan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara.
2. Peningkatan Kinerja Balitbangda Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.
3. Pemanfaatan Optimal Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bahwa berdasarkan issue strategis tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan litbang secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Balitbangda Prov. Kaltim**

Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan PD.	1. Pelaksanaan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, , Bidang Inovasi dan Teknologi.	1. Standar kebutuhan pelayanan yang dikembangkan secara mandiri sesuai tugas dan fungsi PD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat 2. Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis 3. Komitmen Pimpinan Kuat 4. Kualitas SDM Peneliti 5. Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang 6. Belum adanya perda penelitian satu pintu 7. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemindahan IKN ke Kaltim 2. Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3. Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda 4. Adanya asosiasi peneliti di kaltim 5. Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership 6. Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di OPD. 2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang. 3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak. 4. Terbatasnya jumlah peneliti dan bidang kepakarannya yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan provinsi. 5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, database litbang, perpustakaan, dan lain lain)

Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8. Belum adanya rencana induk kelitbangan 9. Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah 10. Kuantitas SDM Peneliti belum optimal 11. Lemahnya jejaring kerja	7. Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain 8. Persaingan di Era Globalisasi 9. Persepsi stakeholders yang kurang responsif 10. Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	6. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim. 7. Belum tersusunnya Grand Design dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (kewenangan PD)	Eksternal (diluar kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>12. Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang</p> <p>13. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim</p> <p>14. Belum adanya database peneliti.</p> <p>15. Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian</p>		

Ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan litbang secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana

Faktor internal yang mempengaruhi isu-isu strategis atau permasalahan tersebut yaitu :

1. Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat
2. Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis
3. Komitmen Pimpinan Kuat
4. Kualitas SDM Peneliti
5. Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
6. Belum adanya perda penelitian satu pintu
7. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
8. Belum adanya rencana induk kelitbangan.
9. Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
10. Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
11. Lemahnya jejaring kerja
12. Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
13. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim
14. Belum adanya database peneliti.
15. Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian

Faktor eksternal yang mempengaruhi isu-isu strategis atau permasalahan tersebut yaitu :

1. Adanya pemindahan IKN ke Kaltim
2. Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda
4. Adanya peraturan tentang SIDA
5. Adanya asosiasi peneliti di kaltim
6. Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership
7. Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah
8. Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan opd lain

9. Persaingan di Era Globalisasi
10. Persepsi stakeholders yang kurang responsif
11. Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah

Aspek strategis organisasi Balitbangda telah didukung dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan aspek strategis tersebut maka Balitbangda Prov. Kaltim memiliki tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, dengan fungsinya yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang social dan pemerintahan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang inovasi dan teknologi;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Permasalahan secara umum dan solusi terkait dengan kelitbang (kesekretariatan, litbang bidang sosial dan pemerintahan, litbang bidang ekonomi dan pembangunan, litbang bidang inovasi dan teknologi, litbang

bidang ekonomi dan pembangunan, laboratorium konstruksi). Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang yaitu :

1. Program kegiatan litbang yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang-bidang masih terfokus pada 2 (dua) kegiatan kelitbang utama yakni kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan belum masuk ke ranah perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan sehingga pengukuran capaian kinerja bidang masih belum optimal.
2. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang dan masih tersebar di perangkat daerah.
3. Hasil-hasil kajian litbang belum mendapat perhatian dan dukungan sepenuhnya oleh user.
4. Jumlah peneliti yang kurang menunjang dengan kebutuhan program strategis Pemerintah Daerah
5. Belum maksimalnya jejaring kerja antar instansi kelitbang di Kab./Kota di Kaltim, karena baru ada 3 instansi litbang di kab/kota yaitu Balitbangda Kab. Kukar, Balitbangda Kab. Kutim dan Balitbangda Kota Samarinda sedangkan kab/kota lainnya fungsi litbang masih melekat di Bappeda/Badan Diklat.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan jasa laboratorium pengujian bidang konstruksi terutama peralatan yang sudah tua dan gedung laboratorium yang tidak memenuhi syarat.
7. Terbatasnya anggaran kelitbang yang menghambat penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah.

Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Menghasilkan Penelitian yang Berkualitas dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Daerah.
3. Mewujudkan Konektivitas Pembangunan Antar Daerah Kabupaten / Kota.
4. Memberikan Informasi dan Data Akurat Berdasarkan Hasil Penelitian Mengoptimalkan Sumber Daya untuk Peningkatan Kelitbang.
5. Sosialisasi Permendagri No. 17 Tahun 2016 dan berkoordinasi terus menerus dengan Balitbang Kementerian Dalam Negeri, guna menetapkan kebijakan satu pintu mengenai kegiatan kajian dan litbang di daerah.
6. Meningkatkan kualitas kajian dan litbang sesuai dengan kebutuhan daerah dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsional peneliti dan perekayasa sesuai dengan kebutuhan daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

8. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
9. Meningkatkan kapasitas SDM kelitbangan melalui diklat, seminar, workshop, diseminasi, lokakarya, semiloka dll.
10. Menindaklanjuti perjanjian kerjasama kelitbangan dengan Badan Litbang Kabupaten/Kota terkait

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.1
Review terhadap RKPD Tahun 2022

Perangkat Daerah : Balitbangda Prov. Kaltim

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitan yang disampaikan ke Perangkat Daerah	100%	2.765.388.000				100%	2.765.388.000	
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	653,660,000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100%	653,660,000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengkajian Peraturan		an dan Pengkajian Peraturan			Pengkajian Peraturan		Pengkajian Peraturan			
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	424.872.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	424.872.000	
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	100%	775.875.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	100%	775.875.000	
4	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	910,981,000	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Kaltim	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	910,981,000	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	16.442.067.990				100%	16.442.067.990	
6	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja PD yang direalisasikan tepat waktu	31 dokumen	1,564,975,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	31 dokumen	1,564,975,000	
7.	Administrasi Keuangan	Samarinda	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 dokumen	10.246.164.396	Administrasi Keuangan	Samarinda	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 dokumen	10.246.164.396	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 bulan	1.604.774.360	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	12 bulan	1.604.774.360	

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 bulan	2.082.468.484	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	jumlah jasa penunjang yang disediakan	12 bulan	2.082.468.484	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 kegiatan	943.685.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	5 kegiatan	943.685.750	
	Jumlah				19.207.455.990					19.207.455.990	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salahsatu isu strategis atau permasalahan yang mendasari tersusunnya sasaran strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yakni “Kelitbangan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Kesejahteraan masyarakat merupakan adalah hal utama yang mendukung disusunnya sasaran startegis Balitbangda Provinsi Kalitim, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 18 tentang penelitian dan pengembangan, disebutkan bahwa penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya. ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penelitian juga dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan. Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Hal mendasar lainnya seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yakni memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi; melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah, sehingga sejatinya kebijakan dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah berdasarkan kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi. Sehingga semua usulan program dan kegiatan kelitbangan yang akan dilaksanakan harus berdasarkan usulan atau permasalahan di masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Gubernur Kalimantan Timur mengusung visi **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Adapun pelaksanaannya harus memerhatikan kesinambungan Visi RPJMD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur agar sejalan dengan rumusan dan tahapan pelaksanaan rencana pembangunan selama periode lima tahun kepemimpinan.

Untuk mewujudkan visi maka diperlukan serangkaian misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan melihat fokus dan peta permasalahan dan isu strategis serta amanat misi dalam RPJPD dan RPJMN maka arahan misi pembangunan 2019-2023 adalah:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan SDA Yang Berahlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkedaulatan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan SDA yang berkedaulatan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Kebijakan perekonomian daerah sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan pola penggunaan anggaran pembangunan. Dengan kata lain diperlukan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar penentuan penyusunan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, ataukah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, maka dalam dokumen perencanaan harus disusun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**TAHAPAN RPJPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2005-2025
(PERDA NO. 15 TAHUN 2008)**

VISI RPJPD KALTIM
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

Sebagaimana tampak pada gambar tersebut, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur pada RPJMD periode keempat (2019-2023), meliputi :

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Pemantapan Struktur Ekonomi
4. Peningkatan Pelayanan Dasar
5. Efisiensi dan efektivitas, pemerintahan yang berbasis penegakan hukum
6. Konsistensi Penataan Ruang Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi
7. Menjaga Kualitas Lingkungan

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Perangkat Daerah (PD) pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan berpedoman dengan tujuan yang mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni : “Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien”. Tujuan tersebut bermakna bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan yang efektif dan efisien atau tepat guna dan sesuai waktu/target dan meningkatkan kinerja Balitbangda. Terkhususnya Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen bahwa Kelitbangan yang dihasilkan memiliki kualitas dalam mendukung setiap langkah pemerintah untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur, dan Mendukung Ibu Kota Negara, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memberikan sumbangsih untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui rekomendasi kebijakan yang inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), meliputi permasalahan ekonomi, sosial dan pemerintahan dan pengembangan inovasi dan teknologi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Dalam mendukung tujuan Renstra, maka dalam menyusun rencana kerja tahun 2022, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur mengusung tujuan yakni : Meningkatkan Kualitas Kelitbangan/Kajian yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara. Adapun sasaran untuk mendukung tujuan tersebut yakni meningkatnya kualitas kelitbangan/kajian yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung Ibu Kota Negara.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program dan kegiatan Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.31
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Judul Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kepada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Kaltim	Bidang Sosial dan Pemerintahan
			Penilaian PD Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timut Tahun 2021	

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Judul Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Master Plan Aplikasi IT dalam Mendukung IKN	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	IPKD dan IKKD	
	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kajian Pendidikan Anak Usia Dini dan Disabilitas di Provinsi Kaltim	Bidang Sosian dan Pemerintahan
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kajian Situs Kerajaan Kutai Ing Martadipura	
	Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Master Plan Food Estate Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kaltim	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Master Plan Peta Jalan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kaltim	
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kajian Rencana Induk Kelitbangan	
	Pengembangan inovasi dan teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan	Kajian mengenai pembangu	Bidang Inovasi dan Teknologi

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Judul Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
		Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	n kawasan pariwisata bahari di kepulauan derawan dan biduk-biduk	
			Master plan air bersih dalam mendukung Ibu Kota Negara	
			Kajian mengenai Pembangunan Iradiator di Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rakorda Kelitbangan	
			Diseminasi Kelitbangan	
			Jurnal Kelitbangan	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi HAKI	

Dalam menentukan judul sub kegiatan melalui beberapa proses atau tahapan yakni : sinkronisasi program dan kegiatan pada Rakorda Kelitbangan, evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang kesemuanya berada di bawah arahan Kepala Badan. Kajian dilaksanakan secara tim yang beranggotakan para tenaga pendamping dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Secara garis besar Rumusan dan Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, serta Penjelasan Pendanaan dan Kesesuaian dengan RKPD Tahun 2022 tampak pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Penunjang								
	Bidang Penelitian dan Pengembangan								
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	2.765.388.000	APBD		100%	2.765.388.000
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Dihasilkan untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%				100%	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	653,660,000	APBD		100%	653,660,000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	162.800.000	APBD		1 laporan	162.800.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	27.660.000	APBD		1 laporan	27.660.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	41.090.000	APBD		1 laporan	41.090.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	2 laporan	193.400.000	APBD		2 laporan	193.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi							
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	228.910.000	APBD		1 laporan	228.910.000
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	424.872.000	APBD		100%	424.872.000
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	285.472.000	APBD		1 laporan	285.472.000
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	139.400.000	APBD		1 laporan	139.400.000
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	775.875.000	APBD		100%	775.875.000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	292.250.000	APBD		1 laporan	292.250.000
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kab./Kota & Prov. Kaltim	1 laporan	200.375.000	APBD		1 laporan	200.375.000
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab./Kota & Prov. Kaltim	100%	910.981.000	APBD		100%	910.981.000
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Kab./Kota & Prov. Kaltim	3 laporan	910.981.000	APBD		3 laporan	910.981.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Publik Pada Tugas Balitbangda	Samarinda	97%	16.442.067.990	APBD		97%	16.442.067.990

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	Samarinda	31 dokumen	1,564,975,000	APBD		31 dokumen	1,564,975,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan		21 dokumen	1.298.100.000			21 dokumen	1.298.100.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 dokumen	266.875.000			10 dokumen	266.875.000
	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Samarinda	14 dokumen	10.246.164.396	APBD		14 dokumen	10.246.164.396
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan		14 dokumen	10.246.164.396			14 dokumen	10.246.164.396
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Samarinda	12 bulan	1.804.774.360	APBD		12 bulan	1.804.774.360
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		12 jenis	112,671,000			12 jenis	112,671,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan		12 dokumen	174.680.400			12 dokumen	174.680.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi		12 laporan	1.317.422.980			12 laporan	1.317.422.980
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Samarinda	12 bulan	2.082,468.484	APBD		12 bulan	2.082,468.484
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan		100	20.000.000			100	20.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji non ASN		13 laporan	1.814.280.880			13 laporan	1.814.280.880
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik		12 laporan	248.207.804			12 laporan	248.207.804

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun .2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	Samarinda	5 kegiatan	943,685.790	APBD		5 kegiatan	943,685.790
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional		27 unit	184.772.390			27 unit	184.772.390
	pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara		2 unit	397.563.400			2 unit	397.563.400
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		1 unit	91.000.000			1 unit	91.000.000
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 unit	270.350.000			1 unit	270.350.000
					19.207.455.990				19.207.455.990

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022 telah disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan telah disesuaikan dengan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022, terdiri dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.

Pendanaan kelitbangan pada anggaran murni dialokasikan sebesar Rp. 2.586.688.000,- dan sekretariat sebesar Rp. 15.300.367.990,-. Total pendanaan Rp. 17.887.055.990,-. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tersebut kemudian disesuaikan dengan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, yang terlampir pada tabel berikut :

**Penetapan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	
Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			19.207.455.990	25.942.302.197	
5	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pelayanan publik pada tugas Balitbangda	97%	16.442.067.990	22.071.748.697
5	05	001	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu		1.564.975.000	113.688.000
5	5	1	1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan		1.298.100.000	64.152.000
5	5	1	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		266.875.000	49.536.000
5	05	001	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	14 dokumen	10.246.164.396	15.895.090.990
5	5	1	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	14 dokumen	10.246.164.396	15.895.090.990
5	05	001	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 bulan	1.804.774.360	3.535.876.843

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
5	5	1	1.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	12 jenis	112.671.000	57.599.892
5	5	1	1.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 dokumen	174.680.400	90.000.000
5	5	1	1.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	1.317.422.980	3.388.276.951
5	05	001	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 bulan	2.082.468.484	2.014.406.144
5	5	1	1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	100	20.000.000	10.800.000
5	5	1	1.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 laporan	248.207.804	440.972.532
5	5	1	1.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan daftar gaji non ASN	13 laporan	1.814.280.880	1.562.633.612
5	05	001	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	5 kegiatan	943.685.790	512.686.720

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
5	5	1	1.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	184.772.390	127.224.000
5	5	1	1.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	270.350.000	63.000.000
5	5	1	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	2 unit	397.563.400	222.462.720
5	5	1	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 unit	91.000.000	100.000.000
5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	100%	2.765.388.000	3.870.553.500
						Persentase Hasil Kelitbangan yang Dihasilkan untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	100%		
5	05	002	1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	653.660.000	1.335.000.000
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 laporan	162.800.000	235.000.000

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	27.660.000	275.000.000
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 laporan	41.090.000	-
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 laporan	193.400.000	550.000.000
5	5	2	1.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 laporan	228.910.000	275.000.000
5	05	002	1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	424.872.000	535.553.500
5	5	2	1.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 laporan	285.472.000	167.000.000
5	5	2	1.02	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 laporan	139.400.000	368.553.500

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
5	05	002	1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	100%	775.875.000	1.500.000.000
5	5	2	1.03	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 laporan	292.250.000	500.000.000
					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					kab. Tenggarong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
					Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
5	5	2	1.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 laporan	200.375.000	500.000.000
					Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
					kab. Tenggarong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
5	05	002	1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	910.981.000	500.000.000
5	5	2	1.04	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Berau, Pulau Derawan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	3 laporan	910.981.000	500.000.000
					Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan				
					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan				
					Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan				

BAB V
P E N U T U P

Bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan tambahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rancangan Akhir Perubahan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dibuat dengan mempedomani peraturan perundangan dan isu-isu aktual serta telah mengakomodir penugasan terbaru kepada Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran tambahan tersebut diberikan pada program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Tahun 2022 yang menghasilkan outcome dalam rangka perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Melalui Rancangan Akhir Perubahan Renja Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait dengan kelitbangan, sehingga ke depannya dapat terwujud kelitbangan satu pintu.

Demikian laporan Rancangan Akhir Perubahan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini disampaikan, dan semoga laporan ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan evaluasi kinerja tahun 2022.

Samarinda, Juli 2022
Plt. Kepala Sekretaris,


Dr.M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197311272006041009